

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah program sampah beruang sudah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat kendala-kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana yang belum bisa mendukung *zero emission*, rencana anggaran biaya, serta masih kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sampah. Kendala dan potensi perbaikan tersebut dapat dilihat melalui aspek-aspek berikut:

- 1) Dalam aspek standar dan sasaran kebijakan, kebijakan yang ditetapkan harus mengikuti standar operasional yang jelas dan terukur. Standar tersebut mencakup prosedur pengelolaan sampah, pemrosesan, dan pengangkutan, serta tujuan akhir program *zero waste zero emission*. Dengan adanya standar yang jelas, implementor dapat memiliki panduan yang cukup kuat untuk menjalankan program dengan efektif dan efisien. Sasaran kebijakan yang ditetapkan dapat diukur. Hal ini memungkinkan evaluasi yang objektif terhadap kemajuan program dan identifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Sasaran yang spesifik juga membantu dalam mengukur dampak nyata dari program terhadap pencapaian tujuan *zero waste zero emission*.

- 2) Dalam aspek sumber daya, sumber daya finansial sangat penting untuk menjalankan program secara efektif. Ketersediaan dana program sampah beruang berasal dari APBD serta pendanaan dari hasil penjualan RDF menjadi landasan utama dalam mendukung operasional program. Alokasi sumber daya, termasuk anggaran, diarahkan dengan perencanaan strategis untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai seiring dengan pertumbuhan dan perubahan kebutuhan program. Sarana dan prasarana juga menjadi penunjang untuk implementasi program sampah beruang. Sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dalam pengelolaan sampah juga menjadi faktor penentu keberhasilan program. Diperlukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para implementor serta petugas lapangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan program.
- 3) Dalam aspek komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, komunikasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal, sangat penting dalam memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, proses, dan tanggung jawab dalam menjalankan program Forum komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait berjalan dengan baik dalam menyelaraskan tugas dan wewenangnya guna mencapai tujuan program sampah beruang forum tersebut berkaitan mengenai perkembangannya

serta kendala atau hambatan yang dialami. Melalui forum komunikasi ini, para agen pelaksana dapat saling berbagi informasi, pengalaman, serta bekerja sama dalam mengidentifikasi Solusi terbaik untuk memperkuat aktivitas program sampah beruang dan mencapai tujuan *zero waste zero emission* di Kabupaten Banyumas. Kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dapat memperkuat kapasitas dan jangkauan program. Dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak, program dapat dijalankan dengan lebih efektif dan berdampak luas.

- 4) Dalam aspek karakteristik agen pelaksana, struktur birokrasi yang digunakan pada TPST Mekarsari cukup sederhana namun efektif. Struktur birokrasi yang sederhana ini memungkinkan untuk koordinasi yang efisien dan komunikasi yang lancar antara berbagai pihak terkait dalam menjalankan Program Sumpah Beruang. agen pelaksana telah menunjukkan karakteristik yang kuat dalam menjalankan komunikasi publik. Agen pelaksana menggunakan berbagai strategi komunikasi yang efektif saat melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Salah satu strategi yang diterapkan adalah penyesuaian gaya komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat. Agen pelaksana juga menunjukkan keterampilan yang baik dalam mengajak partisipasi warga selama kegiatan sosialisasi berlangsung, memastikan bahwa pesan-pesan terkait Program Sumpah Beruang dapat disampaikan

dengan jelas dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, agen pelaksana juga terlihat responsif terhadap pertanyaan dan masukan dari masyarakat, menunjukkan komitmen untuk menjalin komunikasi dua arah yang aktif.

- 5) Dalam aspek disposisi implementor, komitmen implementor terhadap tujuan dan nilai-nilai program mencerminkan disposisi implementor. Implementor menunjukkan kesediaan untuk memberikan kontribusi positif dan berperan aktif dalam menjalankan program, serta memastikan bahwa tujuan program tercapai dengan baik. Terlihat bahwa para implementor memahami pentingnya peran mereka dalam mendukung visi program untuk menjadikan Kabupaten Banyumas sebagai contoh daerah dengan konsep *zero waste to landfill*. Nilai-nilai yang dianut sangat terfokus pada keberlanjutan, tanggung jawab, keadilan, keamanan, keselamatan, nilai ekonomi. Implementor menunjukkan kesadaran lingkungan yang tinggi dan tanggung jawab sosial yang kuat terhadap masyarakat.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan mengenai implementasi program sumpah beruang di Kabupaten Banyumas sebagai upaya mewujudkan daerah yang bebas sampah dan bebas emisi, implikasi yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Secara umum, program sumpah beruang sesudah mencapai tujuannya yaitu *zero waste to landfill*. Namun, untuk tujuan *zero emission* belum tercapai. Untuk mencapai tujuan *zero emission* perlu dilakukan penggunaan teknologi seperti *anaerobic digestion* untuk mengolah sampah organik menjadi biogas. Menerapkan teknologi pengolahan sampah yang lebih efisien seperti *pyrolysis* atau gasifikasi untuk mengurangi emisi dari pembakaran sampah. Menyediakan pelatihan bagi petugas pengelola sampah untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Implementasi sistem pemantauan dan pelaporan emisi yang lebih akurat dan real-time untuk memastikan bahwa emisinya dari seluruh proses pengelolaan sampah dapat dikontrol. Perkuat regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan gas emisi untuk memastikan kepatuhan dari semua pihak.
- 2) Dalam aspek standar dan sasaran kebijakan, perlu adanya pedoman atau regulasi untuk mengatur standar dan sasaran kebijakan terkait *zero emission*. Implementor sebaiknya memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Termasuk bahwa semua aktivitas

pengelolaan sampah seperti pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan, dilakukan sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku.

- 3) Dalam aspek sumber daya, pentingnya mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, termasuk, finansial, manusia, serta sarana dan prasarana. Perlunya regulasi terkait rancangan anggaran biaya untuk program sampah beruang. Perlunya alokasi sumber daya yang efisien dan efektif untuk memastikan keberlangsungan program. Perlunya penguatan infrastruktur dan sarana prasarana terkait pengelolaan sampah untuk mendukung *zero emission*. Perlu berbagai macam sumber pendanaan untuk mendukung keberlangsungan program. Perlu adanya rancangan anggaran biaya untuk *Capex* dan *Opex*. *Capex* adalah jenis pengeluaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan manfaat jangka panjang dan *Opex* adalah pengeluaran rutin yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional atau jangka panjang. Perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program. Pelatihan dan pendidikan terkait pengelolaan sampah yang berkelanjutan, manajemen risiko, dan inovasi menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi program.
- 4) Dalam aspek komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, pentingnya meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal. Dengan meningkatkan

komunikasi dan kerjasama antarorganisasi, berbagai pihak dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam mendukung implementasi program. Salah satu cara agar aspek komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas dapat mencapai tujuannya, maka dibutuhkan sebuah cara, salah satunya adalah penggunaan *platform* digital sebagai media komunikasi, yaitu memanfaatkan teknologi digital, seperti grup WhatsApp, platform kolaborasi online, dan media sosial untuk komunikasi yang cepat dan efisien, dimulai dari memberikan akses kepada semua pihak terkait, dan mendorong penggunaan aktif platform tersebut untuk berbagi informasi. Selain itu, perlunya memperkuat jaringan komunikasi antarorganisasi untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi kegiatan. Dengan memperkuat jaringan komunikasi, berbagai pihak dapat lebih mudah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk mendukung implementasi program dengan lebih baik. Pentingnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Dengan menjaga komunikasi yang terbuka dan memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak terkait, dapat memperkuat kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap program, serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan evaluasi.

- 5) Dalam aspek karakteristik agen pelaksana, perlu memastikan bahwa agen pelaksana memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup untuk menangani berbagai tantangan yang mungkin muncul, baik dari segi

keahlian teknis maupun manajerial. Perlu mengidentifikasi peluang baru dan mengembangkan solusi kreatif untuk mengatasi tantangan yang ada, serta bersedia untuk menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan yang terjadi. Agen pelaksana perlu membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan dukungan dan kolaborasi yang diperlukan dalam pelaksanaan program.

- 6) Dalam aspek disposisi implementor, implementor perlu memiliki komitmen yang kuat akan lebih gigih dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program. Perlu adanya pemahaman terkait pengelolaan sampah gas emisi agar terwujudnya *zero emission* di Kabupaten Banyumas.

